

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi yang diupayakan oleh negara-negara berkembang bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi semua warga negara. Hal ini melibatkan serangkaian upaya dan strategi yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja dengan meningkatkan lapangan pekerjaan, serta mengarahkan distribusi pendapatan yang merata di setiap wilayah dapat tercapai. Menurut Todaro dan Smith (2012) pembangunan ekonomi merupakan proses multidimensi yang melibatkan perubahan-perubahan besar baik dalam struktur sosial, sikap masyarakat maupun kelembagaan nasional, seperti halnya percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan pemberantasan kemiskinan absolut.

Salah satu upaya yang efektif untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong kemajuan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang, adalah dengan melakukan proses industrialisasi. Arsyad (2010) menekankan pentingnya mendorong industrialisasi sebagai strategi pembangunan bagi negara-negara berkembang. Pendekatan ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan penduduk negara tersebut. Proses industrialisasi melibatkan interaksi antara pengembangan teknologi, inovasi, spesialisasi dalam produksi, dan perdagangan antar negara, yang kemudian sejalan dengan peningkatan

pendapatan per kapita yang akan mendorong perubahan struktur perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, proses industrialisasi dalam perekonomian sering kali dipahami sebagai proses perubahan struktur ekonomi (Tambunan, 2001), dengan tujuan agar sektor industri dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Menurut Budiawan (2013) industrialisasi memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dan meningkatkan produksi fisik masyarakat berupa perluasan lapangan usaha dan perluasan kesempatan kerja. Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Tjiptoherianto (1982) bahwa langkah awal yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan jumlah penduduk dan kesempatan kerja adalah mendorong industrialisasi terutama industri pengolahan dimana dari langkah ini diharapkan tercipta keseimbangan. Sektor industri diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih kokoh dan seimbang yaitu struktur ekonomi dengan titik berat industri yang maju didukung dengan sektor pertanian yang tangguh. Pembangunan ekonomi yang mengarah pada industrialisasi mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi sekaligus sebagai kesempatan dalam penciptaan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja.

Industri pengolahan menjadi sektor yang strategis dan dipandang mampu menggerakkan perekonomian negara dengan cara menciptakan lapangan kerja serta mendorong transformasi kehidupan masyarakat menuju ke arah modernisasi di mana dapat menunjang pembentukan daya saing nasional. Sektor industri diharapkan dapat menjadi sektor pemimpin (leading sector) karena diyakini mampu mendorong

pertumbuhan pada sektor-sektor lainnya. Hal ini disebabkan pada dasarnya produk-produk industrial memiliki nilai tambah yang besar dibanding produk-produk dari sektor lainnya (Dumairy,1996).

Perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ditopang oleh sektor industri pengolahan yang ditunjukkan dengan besarnya kontribusi sektor tersebut terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB pada tahun 2019 sebesar 19,70 persen. Kontribusi ini mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 19,87 persen. Pada tahun 2021 sektor industri menyumbang sebesar 19,24 persen terhadap PDB dan menurun menjadi 18,34 persen pada tahun 2022. Kemudian kembali meningkat sebesar 18,67 persen pada tahun 2023. Kontribusi sektor ini memang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir namun apabila dibandingkan dengan sektor primer, misalnya sektor pertanian, maka sektor industri pengolahan tetap unggul karena sektor pertanian hanya menyumbang PDB sebesar 12,53 persen pada tahun 2023.

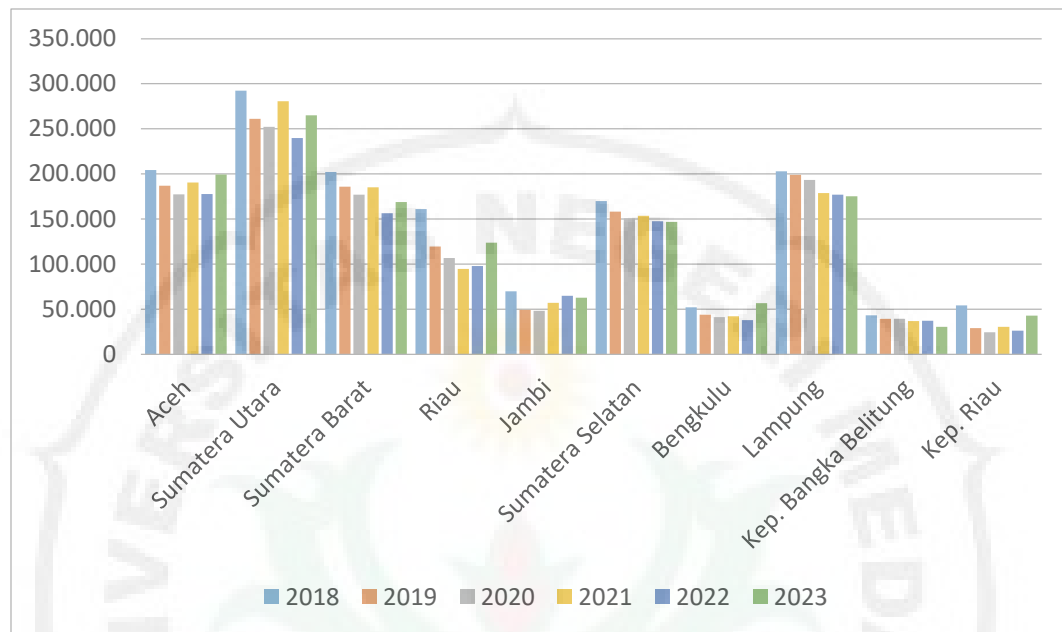
Pulau Sumatera pada tahun 2022 memiliki jumlah penduduk sekitar 59,30 juta orang atau 21,76 persen dari total penduduk Indonesia. Tingginya jumlah penduduk di Pulau Sumatera menyebabkan pulau ini mengalami penambahan jumlah angkatan kerja tiap tahunnya. Pada tahun 2018 jumlah angkatan kerja di Pulau Sumatera sebesar 27,82 juta orang. Jumlah angkatan kerja di Pulau Sumatera cenderung ke arah peningkatan. Sampai dengan tahun 2022 angkatan kerja di Pulau Sumatera tercatat sebesar 30,48 juta orang, mengalami kenaikan sebesar 2,66 juta orang dari tahun

2018. Namun, Pulau Sumatera juga mengalami kenaikan jumlah pengangguran. Pada tahun 2018 pengangguran di Pulau Sumatera adalah sebesar 1,25 juta orang. Pada tahun 2022 pengangguran di Pulau Sumatera sebesar 1,63 juta orang, masalah pengangguran ini masih menjadi isu strategis di Pulau Sumatera yang harus segera ditangani. Peningkatan jumlah angkatan kerja harus diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja sehingga tidak menyebabkan pengangguran meningkat. Seperti yang dikatakan oleh Tjiptoherianto (1982) bahwa langkah awal yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan jumlah penduduk dan kesempatan kerja adalah mendorong industrialisasi terutama industri pengolahan. Industri yang skalanya besar maupun kecil diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dibanding dengan sektor lain. Menurut Lewis (dalam Kuncoro, 2010), pembangunan bisa tercapai bila terjadi perubahan struktur ekonomi dari subsisten (pertanian) menjadi kapitalis (industrialisasi). Inti dari penjelasan Lewis tersebut adalah proses pembangunan dimulai ketika terjadi migrasi tenaga kerja dari sektor pertanian menuju sektor industri. Tujuan industrialisasi adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi karena sektor industri menghasilkan nilai tambah yang tidak dapat dihasilkan oleh sektor pertanian.

Industri pengolahan dikelompokkan menjadi empat golongan berdasarkan jumlah tenaga kerjanya, yaitu industri rumah tangga (mikro), kecil, sedang dan besar. Namun, dalam penelitian ini lebih berfokus pada industri kecil dan menengah. Industri kecil dan menengah (IKM) diharapkan mampu menyerap lebih banyak

tenaga kerja, sehingga kedepannya banyak masyarakat yang hanya memiliki pendidikan yang rendah dan yang berada pada golongan masyarakat menengah kebawah dapat bekerja dan memiliki penghasilan. IKM mampu menjadi andalan bagi perekonomian nasional. Dengan jumlah lapangan usaha formal dan besar semakin terbatas sehingga tidak mampu menyerap cukup banyak tenaga kerja, pada sektor IKM dan sektor yang informal lainnya dapat menjadi alternatif untuk penduduk yang diusia kerja untuk dapat memperoleh pekerjaan. Sektor informal mampu memperoleh pekerjaan lebih mudah dibandingkan dengan sektor yang formal. Sektor informal dapat lebih mudah memperoleh pekerjaan karena untuk kegiatan pada sektor informal bersifat lebih sederhana, dan biasanya sektor-sektor yang informal ini tidak perlu mempunyai izin untuk usaha seperti yang dilakukan oleh usaha-usaha yang besar (Simanjuntak, 1998). Untuk mengetahui penyerapan tenaga kerja pada industri kecil dan menengah di Pulau Sumatera dapat dilihat pada gambar berikut ini:





Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Pada Sektor Industri Kecil dan Menengah Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2018-2023 (Jiwa)

Pada gambar 1.1 diatas, terlihat bahwa penyerapan tenaga kerja industri kecil dan menengah di Pulau Sumatera pada tahun 2018-2023 berfluktuasi dari tahun ke tahun. Dimana provinsi yang memiliki angka tertinggi terletak pada Provinsi Sumatera Utara sebesar 292.487 jiwa pada tahun 2018. Hal ini terjadi karena pemerintah Sumatera Utara telah meluncurkan berbagai kebijakan yang mendukung perkembangan sektor industri kecil dan menengah, seperti program inkubator wirausaha dan pelatihan keterampilan. Kebijakan ini telah meningkatkan ketersediaan tenaga kerja yang terlatih dan siap bekerja di sektor industri. Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Pulau Sumatera, mencapai sekitar 14,5 juta jiwa pada tahun 2018. Dengan populasi yang besar yang berarti juga memiliki jumlah penduduk usia kerja yang lebih banyak, hal ini secara langsung

meningkatkan potensi tenaga kerja yang tersedia untuk bekerja di sektor industri kecil dan menengah. Sedangkan provinsi yang memiliki angka terendah terdapat di Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 24.307 jiwa pada tahun 2020. Hal ini terjadi karena Provinsi Kepulauan Riau memiliki struktur ekonomi yang lebih terfokus pada sektor pariwisata dan jasa, dibandingkan dengan Sumatera Utara yang memiliki diversifikasi ekonomi yang lebih luas, termasuk industri pengolahan dan manufaktur. Hal ini berarti bahwa Kepulauan Riau memiliki lebih sedikit kesempatan kerja di sektor industri kecil dan menengah. Penyerapan tenaga kerja sektor industri kecil dan menengah pada tahun 2018 sampai 2023 cenderung menurun meskipun tetap menjadi dominasi serapan tenaga kerja terbesar di Sumatera Utara, serapan tenaga kerja sektor industri kecil dan menengah mengalami penurunan. Penurunan serapan tenaga kerja pada sektor industri kecil dan menengah mengindikasikan penurunan minat penduduk bekerja di sektor tersebut. Penurunan persentase lapangan kerja disebabkan karena semakin berkembangnya sektor non industri dan menjadi daya tarik penduduk untuk mencari pekerjaan pada sektor lainnya, dimana tingkat upah dari sektor non industri yang jauh lebih besar dari sektor industri kecil dan menengah. Hal ini mengindikasikan bahwa penyerapan tenaga kerja industri kecil dan menengah di Pulau Sumatera Utara masih kurang baik.

Adapun salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada industri kecil dan menengah yaitu jumlah unit usaha. Badan Pusat Statistik mendefinisikan unit usaha adalah unit yang melakukan kegiatan yang dilakukan oleh

perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan dan mempunyai kewenangan yang ditentukan berdasarkan kebenaran lokasi bangunan fisik, dan wilayah operasinya. Secara umum, peningkatan jumlah industri akan meningkatkan jumlah output yang akan dihasilkan. Output yang dimaksudkan disini adalah nilai produksi. Dengan meningkatnya output maka lapangan pekerjaan meningkat dan akan mengurangi pengangguran atau dengan kata lain akan meningkatkan permintaan tenaga kerja. (Matz, 2003). Jumlah unit usaha pada sektor industri kecil dan menengah menurut provinsi yang ada di Pulau Sumatera tahun 2018-2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 2 Jumlah Unit Usaha Pada Sektor Industri Kecil dan Menengah Menurut Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2018-2023 (Unit)

Dapat dilihat gambar diatas menunjukkan jumlah unit usaha pada sektor industri kecil dan menengah menurut provinsi di Pulau Sumatera tahun 2018-2023 sangat beragam. Dimana jumlah unit usaha tahun 2018-2022 tertinggi terjadi pada Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 140.608 unit pada tahun 2018. Hal ini terjadi karena Sumatera Utara memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti kayu, minyak sawit, dan bahan baku lainnya, dan Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi pasar lokal yang besar, serta akses yang mudah ke pasar nasional. Hal ini memungkinkan usaha kecil dan menengah untuk mengeksport produknya, sehingga meningkatkan kesempatan kerja dan pertumbuhan usaha. Sedangkan provinsi yang memiliki angka terendah terdapat di Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 13.779 unit pada tahun 2020. Hal ini terjadi karena Kepulauan Riau memiliki kawasan industri yang relatif terbatas dan luas lahan yang rendah untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (5 hektar per hamparan), yang dapat membatasi kemampuan sektor industri kecil dan menengah untuk berkembang. Jika ditelaah lebih jauh, ada beberapa kesenjangan antara teori jumlah unit usaha dengan data jumlah penyerapan tenaga kerja yang terjadi dilapangan. Jumlah unit usaha di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022 sebesar 74.056 perusahaan meningkat menjadi 77.216 perusahaan pada tahun 2023, atau mengalami peningkatan sebesar 3.160 perusahaan. Namun, meskipun jumlah industri meningkat, penyerapan tenaga kerja di sektor industri kecil dan menengah justru mengalami penurunan. Pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa jumlah pekerja di sektor ini berkurang dari 147.425 pekerja pada tahun 2022 menjadi 146.961 pekerja pada tahun 2023, yang berarti terjadi penurunan sebesar 464 pekerja. Tentunya hal ini

menjadi kajian yang menarik untuk mengkaji lebih lanjut teori jumlah unit usaha terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil dan menengah di Pulau Sumatera.

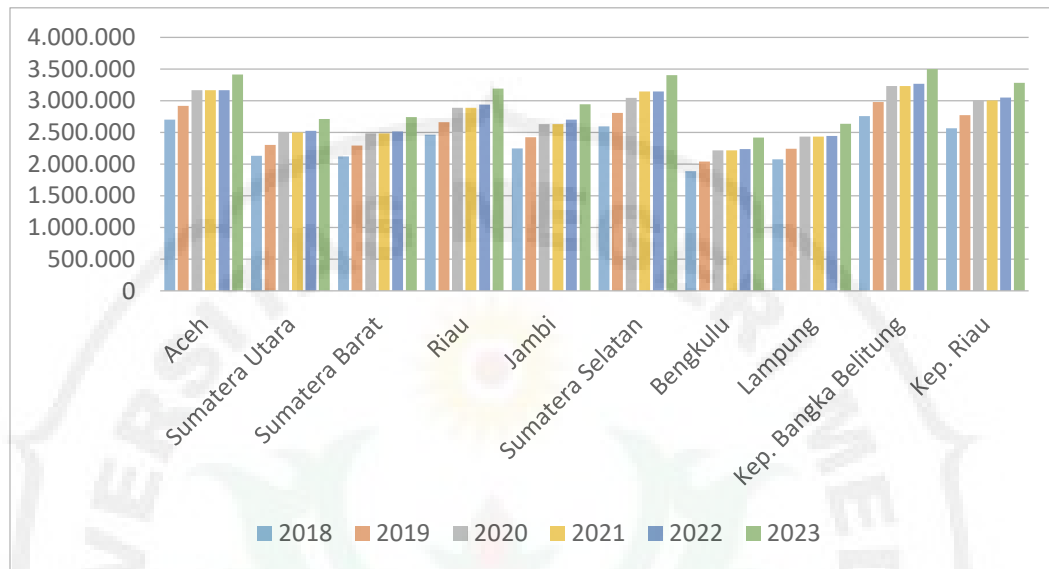
Menurut Raharjo M Dawam yang menyatakan bahwa peningkatan jumlah perusahaan maka akan meningkatkan jumlah output yang akan dihasilkan sehingga lapangan pekerjaan meningkat dan akan mengurangi pengangguran atau dengan kata lain akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja (Raharjo,1994).

Hal ini sejalan sebagaimana yang telah diuji oleh (Muhtamil, 2017) dimana jumlah unit usaha secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2008-2012. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah unit usaha dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri. Namun penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Atifatur, 2018) dimana jumlah unit usaha berpengaruh negatif namun signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri di Kabupaten Gresik. Tentunya *research gap* ini menjadi kajian yang menarik untuk mengungkap lebih lanjut pengaruh jumlah unit usaha terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil dan menengah di Pulau Sumatera.

Selain jumlah unit usaha, upah minimum juga mempunyai pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Upah diartikan sebagai penerimaan penghasilan atas imbalan yang telah dilakukan dan dibayarkan oleh pengusaha kepada tenaga kerja

berupa uang yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan dibayarkan sesuai kesepakatan atau perjanjian antara pengusaha dengan tenaga kerja meliputi tunjangan yang diberikan untuk tenaga kerja itu sendiri serta untuk keluarganya (Sumarsono, 2003). Dalam pernyataan ini, perubahan pada besaran upah akan mempengaruhi jumlah pekerja yang akan dipekerjakan. Kaufman (2000) menjelaskan bahwa semakin tinggi upah yang ditetapkan akan membawa pengaruh pada tingginya tingkat pengangguran yang terjadi. Tingginya upah yang ditetapkan akan berpengaruh pada peningkatan biaya output. Sehingga mengakibatkan adanya efisiensi terhadap produksi dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Dengan kata lain, adanya peningkatan upah dapat mengurangi penyerapan tenaga kerja. Upah Minimum Provinsi (UMP) menurut provinsi di Pulau Sumatera tahun 2018-2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini:





Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1.3 Upah Minimum Provinsi (UMP) Menurut Provinsi Di Pulau Sumatera tahun 2018-2023 (Rupiah)

Dapat dilihat gambar diatas menunjukkan Upah Minimum Provinsi (UMP) menurut provinsi di Pulau Sumatera tahun 2018-2023 terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Dimana UMP tahun 2018-2023 tertinggi terjadi pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Aceh, dan Sumatera Selatan. Hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda di setiap wilayah serta faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh pemerintah dalam menetapkan upah. Meningkatnya upah tersebut diharapkan memberikan perlindungan terhadap pekerja untuk mendapatkan pengupahan yang layak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh orang tersebut dan meningkatnya upah tersebut juga diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, meningkatnya upah minimum provinsi berbanding terbalik

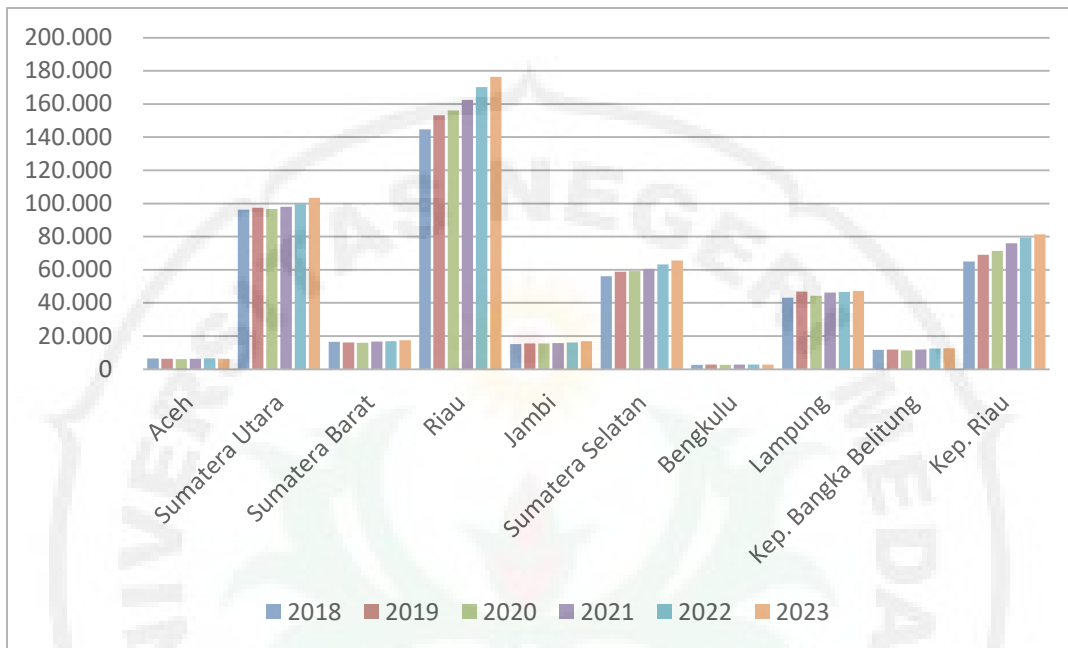
dengan penyerapan tenaga kerja pada industri kecil dan menengah di tahun yang sama yang mengalami fluktuasi (gambar 1.1).

Menurut (Simajuntak, 1985) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan, maka berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi, akibatnya untuk melakukan efisiensi, perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja, yang berakibat pada rendahnya tingkat kesempatan kerja. Sehingga diduga tingkat upah mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kesempatan kerja.

Teori ini diperkuat dengan suatu penelitian yang dilakukan oleh (Prastyaningsih, 2016) bahwa UMP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri di Karesidenan Surakarta selama tahun 2006-2013. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan UMP dapat menurunkan penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hasanah, 2016) yang menunjukkan bahwa UMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri di Karesidenan Pekalongan selama tahun 2008-2013. Tentunya *research gap* ini menjadi kajian yang menarik untuk mengungkap lebih lanjut pengaruh pengeluaran perkapita terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil dan menengah di Pulau Sumatera.

Selain jumlah unit usaha dan upah, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) juga menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah pada periode waktu

tertentu. Peningkatan PDRB menunjukkan bahwa ekonomi di wilayah tersebut sedang bertumbuh. PDRB yang merupakan nilai keseluruhan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau keseluruhan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (Priambodo, 2014). Menurut teori yang dikemukakan Keynes bahwa untuk mengurangi pengangguran tenaga kerja di suatu wilayah diperlukan peningkatan pengeluaran agregat (output) melalui pertumbuhan PDRB di wilayah tersebut (Sukirno, 2006). Pasar tenaga kerja hanya akan mengikuti apa yang terjadi di pasar barang. PDRB dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat maka jumlah nilai output atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi di suatu daerah akan meningkat. Semakin besar output yang diproduksi perusahaan maka akan mendorong perusahaan untuk menambah tenaga kerja agar produksinya dapat ditingkatkan untuk mengejar peningkatan penjualan. Hal tersebut secara langsung dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja (Feriyanto, 2014). PDRB Sektor industri menurut provinsi di Pulau Sumatera tahun 2018-2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 4 PDRB Sektor Industri Pengolahan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2018-2023 (Miliar Rupiah)

Dapat dilihat gambar diatas menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri pengolahan menurut provinsi di Pulau Sumatera tahun 2018-2022 cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dimana PDRB sektor industri pengolahan tahun 2018-2023 tertinggi terjadi pada Provinsi Riau yaitu sebesar 176.290 miliar pada tahun 2023. Hal ini terjadi karena Provinsi Riau merupakan salah satu produsen CPO (Crude Palm Oil) terbesar di Indonesia. Sebagian besar industri pengolahan di Riau berfokus pada pengolahan kelapa sawit dan turunannya, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB. Pada tahun 2023, Riau menyuplai sekitar 20,75% dari total produksi CPO nasional. Sedangkan

provinsi yang memiliki angka terendah terdapat di Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 2.713 miliar pada tahun 2020. Hal ini terjadi karena Provinsi Bengkulu tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti beberapa provinsi lain di Pulau Sumatera. Banyak unit usaha di Bengkulu beroperasi dalam skala mikro dan kecil, yang sering kali tidak memiliki kapasitas untuk memproduksi dalam jumlah besar atau untuk melakukan inovasi. Ini membatasi kontribusi mereka terhadap PDRB sektor industri pengolahan. Jika ditelaah lebih jauh, terdapat beberapa kesenjangan antara teori PDRB dengan data jumlah penyerapan tenaga kerja yang terjadi di lapangan. Pada tahun 2018-2023, PDRB sektor industri pengolahan di Provinsi Riau terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 sebesar 144.728 miliar meningkat menjadi 176.290 miliar pada tahun 2023. Namun, meskipun jumlah PDRB industri pengolahan yang terus meningkat, penyerapan tenaga kerja di sektor industri kecil dan menengah justru mengalami penurunan. Pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa jumlah pekerja di sektor ini berkurang dari 161.034 pekerja pada tahun 2018 menjadi 123.796 pekerja pada tahun 2023. Tentunya hal ini menjadi kajian yang menarik untuk mengkaji lebih lanjut teori PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil dan menengah di Pulau Sumatera.

Menurut (Mankiw, 2006) menyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat menjadi tolak ukur kinerja perekonomian dan pembangunan wilayah. Pertumbuhan ekonomi memberikan peluang kesempatan kerja baru dan memberikan

kesempatan perusahaan untuk meningkatkan output dan akan terjadi penyerapan tenaga kerja.

Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Elsa, 2016) bahwa PDRB sektor industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Kabupaten Bandung selama tahun 2001-2014. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan PDRB sektor industri pengolahan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mulyadi, 2022) yang menunjukkan bahwa PDRB sektor industri pengolahan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2015-2019. Tentunya research gap ini menjadi kajian yang menarik untuk mengungkap lebih lanjut pengaruh PDRB sektor industri pengolahan terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil dan menengah di Pulau Sumatera.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa kontribusi sektor industri pengolahan di Pulau Sumatera mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 kontribusi sektor industri terhadap perekonomian Pulau Sumatera sebesar 19,85 persen, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 20,09 persen. Peningkatan ini mencerminkan semakin pentingnya sektor industri pengolahan dalam perekonomian di Pulau Sumatera. Namun realitanya adalah kontribusi sektor industri yang meningkat ternyata belum mampu mendorong penyerapan tenaga kerja juga mengalami peningkatan, terutama pada sektor industri kecil dan menengah.

Berbagai teori dan hasil riset yang menghubungkan jumlah unit usaha, upah minimum provinsi, dan PDRB sektor industri pengolahan terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil dan menengah menunjukkan masih adanya perbedaan maupun kesenjangan (*research gap*). Dengan mempertimbangkan bahwa sektor industri kecil dan menengah berpotensi dalam memperluas lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Jumlah Unit Usaha, UMP, Dan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Dan Menengah Di Pulau Sumatera”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah-masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyerapan tenaga kerja sektor industri kecil dan menengah di Pulau Sumatera tahun 2018-2023 mengalami fluktuasi dimana salah satu penyebabnya tingkat upah, berkurangnya jumlah unit usaha, serta berkurangnya minat tenaga kerja untuk bekerja pada industri kecil dan menengah sehingga menyebabkan penyerapan tenaga kerja cenderung mengalami penurunan.
2. Peningkatan jumlah unit usaha tidak selalu diikuti dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terserap pada industri kecil dan menengah.

3. Upah minimum provinsi cenderung meningkat setiap tahunnya. Namun berdinding terbalik dengan penyerapan tenaga kerja yang justru mengalami fluktuasi.
4. PDRB sektor industri pengolahan menengah di Pulau Sumatera cenderung mengalami kenaikan namun tidak selalu diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor industri kecil dan menengah.

1.3 Pembatasan Masalah

Sebagai batasan masalah yang ditetapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan variabel jumlah unit usaha, Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri pengolahan sebagai variabel independen. Dan penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Kecil dan Menengah sebagai variabel dependen.
2. Pengaruh upah terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri kecil dan menengah dalam penelitian ini dilihat dari sisi permintaan tenaga kerja.
3. Objek penelitian adalah 10 provinsi yang ada di Wilayah Sumatera.
4. Periode penelitian ini adalah tahun 2018-2023.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh jumlah unit usaha terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri kecil dan menengah di provinsi yang ada di Pulau Sumatera?
2. Apakah terdapat pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri kecil dan menengah di Provinsi yang ada di Pulau Sumatera?
3. Apakah terdapat pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri pengolahan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri kecil dan menengah di Provinsi yang ada di Pulau Sumatera?
4. Apakah terdapat pengaruh jumlah unit usaha, PDRB sektor industri, dan UMP terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri kecil dan menengah di Provinsi yang ada di Pulau Sumatera?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah unit usaha terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri kecil dan menengah di provinsi yang ada di Pulau Sumatera.
2. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri kecil dan menengah di provinsi yang ada di Pulau Sumatera.
3. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri pengolahan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri kecil dan menengah di provinsi yang ada di Pulau Sumatera.
4. Untuk mengetahui pengaruh jumlah unit usaha, UMP dan PDRB sektor industri terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri kecil dan menengah di provinsi yang ada di Pulau Sumatera.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam dua aspek, yaitu aspek empiris dan aspek praktis :

1. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi secara empiris yaitu memberikan kontribusi pada pengetahuan terhadap penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan khusus tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan.

2. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi secara Praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan kontribusi dalam pengembangan penelitian yang akan datang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berharga terutama dalam bidang ilmu ekonomi yang berkaitan dengan ketimpangan pendapatan, serta sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi permasalahan ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara.

